

Senja Kala Ruang Publik

Sound *hong* sebagai fenomena audio-kultural berkembang menjadi kontroversi di Indonesia, dan Jawa Timur pada khususnya.

Sistem audio dengan intensitas suara sangat ekstrem ini menimbulkan reaksi fisiologis pada pendengaran manusia serta memicu respons sosial kompleks.

Fatwa haram dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (12 Juli 2025). Persoalan ini tidak sekadar kebisingan, melainkan juga dimensi moral dan sosial.

Fatwa keagamaan itu hanyalah salah satu aspek dan dekusi lebih besar mengenai bagaimana masyarakat memaknai kebisingan, hiburan, dan batasan ruang publik.

Dari perspektif teknis, *sound hong* mengoperasikan sistem audio pada level desibel yang jauh melebihi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ambang batas aman paparan suara di luar ruangan adalah 55 desibel, sementara *sound hong* dapat mencapai 130 desibel, bahkan lebih.

Pada level ini, getaran yang dihasilkan tidak hanya dirasakan sebagai gelombang suara, tetapi juga sebagai tremor fisik yang mampu mengganggu struktur bangunan.

Elektrik menjadi daya tarik sekaligus sumber masalah karena di satu sisi menciptakan sensasi unik bagi pendengar, di sisi lain berpotensi merusak infrastruktur sekitar.

Psikokustik memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa suara dengan intensitas tinggi itu tetap digemari meski berisiko merusak pendengaran.

Saya menguraikan manipulasi frekuensi bass yang dalam dan efek *reverb* yang diproses secara khusus mengubah persepsi pendengar terhadap kebisingan.

Terjadilah hipernormalisasi sistem pendengaran, yakni kombinasi efek audio menciptakan beban kognitif melebihi kapasitas pemrosesan auditori normal.

Suara yang seharusnya dianggap sebagai polusi (*noise*) berubah menjadi pengalaman mendengar yang dianggap menyenangkan (*voice*).

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan cara otak memproses stimulus suara keras, pelepasan dopamin dan adrenalin menciptakan keadaan euforia sementara (biasanya berlangsung di diskotek atau konser musik besar), mengaburkan



Aris Setiawan

Etnomuskolog
Pengajar di ISI Solo

kesadaran akan dampak negatif jangka panjang.

Dampak sosial *sound hong* terlihat dalam polarisasi respons masyarakat. Sebagian kelompok, terutama yang terlibat langsung dalam acara-acara *sound hong*, memandang sebagai bentuk ekspresi budaya dan hiburan yang sah.

Kelompok lain, termasuk para orang tua, golongan rentan seperti ibu hamil, ahli agama, dan tenaga medis, menganggap sebagai gangguan serius terhadap kesehatan dan ketenangan hidup.

Konflik ini memperburuk ketegangan antara hak berekspresi dan hak atas lingkungan yang sehat. Aspek pertunjukan yang menyertai *sound hong* menambah lapisan kompleksitas fenomena ini.

Truk-truk besar yang membawa perangkat audio raksasa itu tidak berjalan sendiri; mereka diiringi penari dan atraksi visual lain yang mengubah acara menjadi semacam "karnaval jalanan".

Pertunjukan semacam ini mengindokasikan *sound hong* bukan sekadar soal volume suara, melainkan juga tentang penciptaan ruang spektakel di tempat umum.

Karakteristik ini membuatnya berbeda daripada sekadar konser musik keras atau acara hiburan konvensional.

Memperbesar Empati

Regulasi mengenai polusi suara di Indonesia sebenarnya telah ada, salah satunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengaturan aturan ini menghadapi kendala implementasi ketika berhadapan dengan fenomena seperti *sound hong* yang dikemas sebagai

bagian acara resmi, budaya, atau tradisi lokal.

Ketidakefektifan dalam menentukan otoritas pendindakan dan kurangnya alat ukur kebisingan yang memadai di tingkat lapangan turut berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, paparan suara keras dalam jangka panjang secara terus-menerus (di atas 85 desibel) terbukti menyebabkan berbagai masalah, gangguan pendengaran permanen hingga peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

Kesadaran akan risiko kesehatan ini belum secara efektif diterjemahkan menjadi perubahan perilaku di tingkat komunitas yang gemar menyelenggarakan acara *sound hong*.

Perbandingan dengan negara lain memperlihatkan variasi dalam menangani masalah serupa. Beberapa negara di Eropa menerapkan sistem *zoning* ketat untuk acara bersuara keras (*European Environment Agency*, 2020).

Di Amerika Serikat, aturan kebisingan biasanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di Asia Tenggara, Thailand dan Malaysia memiliki tradisi musik jalanan yang mirip, namun dengan regulasi volume yang lebih ketat (Kritika Lertsawai, 2011).

Rebalasan pendekatan ini menunjukkan solusi *sound hong* perlu mempertimbangkan konteks sosio-kultural Indonesia yang spesifik. Evaluasi teknologi audio turut memengaruhi perkembangan *sound hong*.

Kemajuan *amplifier* dan sistem *speaker* memungkinkan produksi suara dengan kekuatan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Teknologi ini, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas reproduksi suara, justru dimanfaatkan untuk menciptakan intensitas ekstrem dalam *sound hong*.

Psikologi massa membantu menjelaskan mengapa acara *sound hong* mampu menarik minat banyak orang. Faktor desindivikasi dalam kerumunan dan pengaruh kelompok dapat membuat individu mengabaikan pertimbangan rasional tentang risiko kesehatan.

Fenomena ini mirip dengan perilaku penonton dalam konser musik besar atau acara olahraga, batasan personal menjadi kabur dalam euforia kolektif. Pemahaman tentang dinamika psikologis ini penting untuk

merancang intervensi yang efektif.

Dimensi ekonomi tidak boleh dabaikan dalam analisis *sound hong*. Industri di balik fenomena ini melibatkan berbagai pihak, penyedia peralatan audio, operator teknis, hingga kelompok entertainer yang mengiringi acara.

Untuk sebagian komunitas, *sound hong* menjadi sumber penghasilan signifikan. Aspek ekonomi ini menambah kompleks upaya mengatur karena larangan langsung tanpa alternatif mata pencaharian dapat menimbulkan resistensi dari mereka yang bergantung pada aktivitas tersebut.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah *sound hong* merepresentasikan bentuk baru budaya populer atau sekadar manifestasi dari ketiadaan regulasi yang efektif? Jawabannya mungkin terletak di antara keduanya.

Fenomena ini tumbuh di ruang kosong antara perkembangan teknologi, perubahan selera hiburan, dan kurangnya pengawasan terhadap polusi suara.

Pemahaman holistik diperlukan untuk mengurangi kompleksitas ini tanpa terjebak dalam dikotomi *polusi* dan *kontra* yang sederhana.

Masa depan *sound hong* sangat tergantung pada bagaimana berbagai pemangku kepentingan merespons fenomena ini. Solusi yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan aspek teknis, kesehatan, sosial, dan ekonomi secara simultan.

Sound hong bukan sekadar masalah kebisingan, tetapi cerminan dari dinamika masyarakat kontemporer dalam berinteraksi dengan teknologi, ruang publik, dan norma kolektif.

Sound hong bukan sekadar trend yang menguncung-gendang telinga, melainkan juga tentang masyarakat modern menghadapi benturan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.

Fenomena ini mengajak kita menengok di mana batas antara hiburan dan gangguan, antara tradisi dan risiko, antara kebisingan yang diterima dan yang ditolak.

Keberadaannya memaksa kita mempertanyakan ulang regulasi, kesadaran kesehatan publik, bahkan makna ruang bersama dalam era yang semakin individualistik.

Solusinya bukan hanya pada mengontrol volume, tetapi pada memperbesar empati dan kebijaksanaan kolektif.